



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
  - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
  - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
  - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
  - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
  - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
  - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30



## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	17
2.3 Hasil evaluasi SAKIP.....	25
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang .....	27
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III .....	47
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	54
BAB IV .....	69
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	69
BAB V .....	80
PENUTUP.....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik ( material ) maupun non fisik ( mental dan spiritual ) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem

perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG “ AMAN “  
“ ADIL MAKMUR AGAMIS NGANGENI”.**

**Misi ada 6 yaitu :**

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan Berkesinambungan

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 2 yaitu “ **MAKMUR** “ dan Misi ke 5 yaitu “**Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**“

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Program DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam Rencana Strategis ( Renstra ) DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran



dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun ke satu periode RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2021-2026 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

- Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  - 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  - 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
  - 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69 Tahun 2019);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 );
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 - 2026;
- 28) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 29) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 30) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2022 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2021-2026

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 yang disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas Program dan kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2022 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2022.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2022 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 guna mencapai tujuan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
	2.3 Hasil Evaluasi SAKIP
	2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
	2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
	2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan Tahun 2020 sebesar 7.446.931.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 3.390.657.000 dan belanja tidak langsung 4.026.274.000. Dengan adanya dampak covid 19, untuk menjamin agar program dan kegiatan tahun berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka terjadi rasionalisasi Anggaran APBD Kabupaten Pemalang 2020 Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, pada APBD Perubahan Tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 5.487.176.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.520.475.000 ( turun 25,66% ) dan belanja tidak langsung sebesar 2.966.701.000 ( turun 26,66), yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung

- Belanja Tidak Langsung                      Rp. 2.966.701.000,00
- Belanja Langsung                              Rp. 2.520.475.000,00

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :



Tabel II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
2	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan dasar										
2.12	Bidang Penanaman Modal										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim dengan baik	20.000	49.458	5.500	10.045	182,6	8.500	68.003	340.015
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	60	48	12	12	100	12	72	120
01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan gedung kantor setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang memadai setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang mencukupi setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang memadai setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan rapat-rapat koordinasi di luar daerah	400	280	40	33	82.5	85	398	120
01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
01	20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat-rapat koordinasi pendampingan setiap bulan	800	700	60	79	131.6	80	859	107.3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor											
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jumlah Perlengkapan Kantor	25	5	2	2	100	1	8	32
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jumlah Peralatan Kantor	25	12	1	1	100	7	20	80
02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	100	85	0	0	-	57	142	142
02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya	20	30	0	0	-	20	50	166,6
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120

Kode Rekening	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang diperbaiki dengan baik setiap bulan	60	48	12	12	100	12	72	120
02	45	Pemeliharaan rutin/berkala Software dan Sistem Informasi	Jumlah software dan sistem informasi yang dipelihara dengan baik	5	5	1	1	100	1	7	120
03	Program peningkatan disiplin aparatur										
03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	450	60	60	60	100	60	180	40
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
05	05	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi pelayanan perijinan yang dilaksanakan	75	27	3	3	100	4	34	45.3
05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	250	223	53	53	100	120	396	158.4

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50	100	20	20	100	30	150	300
09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD										
09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	550	440	177	177	100	90	707	128.5
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
15	01	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan usaha kecil menengah	Jumlah kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	5	4	-	-	-	1	5	100
15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen potensi unggulan di daerah yang dibuat	10	7	2	4	200	2	13	130
15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilaksanakan	50	66	17	8	47.05	20	94	188
15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Jumlah pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	60	48	-	-	-	12	72	120
15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan	Jumlah pemantauan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	200	137	35	54	154.2	42	233	116.5
15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	14	11	1	2	200	6	19	135.7
15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan perijinan yang dilaksanakan	100	121	23	22	95.6	21	164	164

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
16	06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan	20.000	21.962	4.000	6.416	160.4	5.000	33.378	166.8
16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disusun	10	13	3	1	33.3	2	16	160
18	<b>Program Penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan</b>										
18	01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	jumlah permasalahan di bidang investasi dan perijinan	50	35	7	4	57.1	10	49	98

Dari tabel kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencapai 85% ke atas sekitar 90%. Capaian Kinerja yang sangat baik bisa dilihat di kegiatan pameran dengan capaian 200% dikarenakan dari target 1 Kegiatan Pameran, dalam pelaksanaannya menjadi 2 kegiatan pameran. Untuk capaian kinerja yang dibawah 85% ada pada kegiatan Fasilitasi Pengaduan, dengan capaian 57,1%, Hal ini di sebabkan karena dari target 7 Pengaduan hanya ada 4 pengaduan. Meskipun demikian secara kinerja bisa di katakan baik karena semakin sedikit pengaduan maka semakin baik tingkat pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 2.130.681.500,- ( 95,98 %)
- b. Realisasi Belanja Langsung Rp. 2.481.630.659,- ( 98,46 %)

Realisasi pendapatan pada tahun 2020 tidak mencapai 100% atau hanya mencapai 95,98%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat capaian dari pendapatan tidak mencapai 100%.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

Table : II.2

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Kode Rekening	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KET SISA / (KURANG )
<b>1.16.1.20.30.00.00. 000.4.1.2.03.01</b>	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	2.220.000.000	2.130.681.500	95.98	(89.318.500)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.220.000.000</b>	<b>2.130.681.500</b>	<b>95.98</b>	<b>(89.318.500)</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terintegrasi secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sudah menangani 89 jenis ijin.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020 Sebagaimana tabel II.3

Tabel II.3  
Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
2	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
3	Izin Prinsip	120	102	1	98	90	0
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	270	266	0	230	172	1
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	65	65	0	40	39	0
6	Izin Lokasi	43	42	0	15	15	0
7	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0	0	0	0
8	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0	0	0	0
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	7	7	0	2	2	0
10	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	0	0	0
11	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0	0
12	Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	73	70	0	61	61	0
13	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	0	0	0	1	1	0
14	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	12	10	0	6	6	0
15	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	4	4	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
16	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	7	4	2	0	0	0
17	Izin Reklame						
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	415	413	0	313	308	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	15	15	0	16	6	1
18	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	3	1	1	0	0	0
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	0	0	0	0	0	0
19	Izin Instalasi Listrik	0	0	0	0	0	0
20	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0	0	0	0
21	Izin Penyalur Petir	0	0	0	0	0	0
22	Izin Pesawat Lift	0	0	0	0	0	0
23	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0	0	0	0
24	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0	0	0	0
25	Izin Usaha Angkutan	9	7	0	1	2	0
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	92	90	0	83	81	0
	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0	0	0	0
27	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	18	15	0	17	18	0
28	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0	0	0	0
29	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	0	0	0	1	1	0
30	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	12	0	16	15	0
	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	-	-	-	7	6	-
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	-
31	Izin Usaha Industri (IUI)	53	52	0	6	5	0
	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	-	-	-	-	-	-
32	Surat Ijin Operasional Panti	1	1	0	2	2	0
33	Izin Pemakaman	27	27	0	30	30	0
34	Izin Pengabuan Mayat	17	17	0	12	12	0
35	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0
36	Izin Penyelenggaraan Optikal	3	3	0	1	1	0
37	Izin Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	0
38	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	11	10	0	5	5	0
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	6	5	0	4	4	0
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	8	8	0	0	0	0
39	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	3	0	3	1	0
	Izin Operasional Tetap Klinik	16	11	0	10	10	0
	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						



No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
40	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	67	61	0	57	62	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	6	6	0	5	5	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	182	151	0	154	128	0
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	187	181	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	161	134	0	339	362	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	77	77	0	50	45	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	50	54	0	16	16	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	1	1	0	3	5	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	10	10	0	2	2	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	39	39	0	25	25	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	4	4	0	1	1	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	4	4	0	39	40	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	183	179	0	249	246	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	43	42	0	29	29	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	11	11	0	9	9	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	5	5	0	1	1	0
	-Surat Izin Tukang Gigi	2	2	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1	1	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara	1	1	0	0	0	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK	-	-	-	2	2	0
41	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0
42	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	0	0	0	2	2	0
43	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan						
	- Izin Apotek (SIA)	48	47	0	29	27	0
	- Izin Toko Obat	3	3	0	13	12	0
	- Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0	1	1	0
44	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	190	184	0	230	193	0
45	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	1	0	2	0	0
46	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0
47	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
48	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	0	0	0	0
49	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0	0	0	0
	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	0	0	0	0	0	0
51	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11	10	0	21	20	0
52	IzinLembaga Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
53	Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten						
54	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)						
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	4	4	0	3	3	0
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	15	13	0	0	0	0
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0	0	0	0
	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0	0	0	0
55	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	97	84	0	72	63	0
56	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0	0	0	0
57	Izin Lingkungan	20	20	0	15	14	0
58	Izin Membuka Tanah	0	0	0	0	0	0
59	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	135	131	0	217	217	0
60	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker	0	0	0	0	0	0
61	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	44	43	0	24	22	0
62	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
63	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
64	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada	0	0	0	0	0	0
65	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	0	0	0
66	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0
	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	0	0	0
67	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0	0	0	0
68	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
69	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0
70	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul local	0	0	0	0	0	0
71	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
72	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
73	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
74	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
75	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
76	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0
77	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
78	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
79	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
80	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0
81	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	14	11	0	14	14	0
	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	1	0	0	2	2	0
82	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
83	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	3.187	3.187	0	3.924	3.924	0
84	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
85	Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	6	6	0	8	4	0
86	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
87	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	Izin Usaha Peternakan	7	7	0	3	3	0
	Tanda Daftar Usaha Peternakan	17	16	0	10	9	0
	Izin Praktek Dokter Hewan	2	2	0	0	0	0
	Izin Klinik Hewan	1	1	0	0	0	0
88	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	1	1	1	0	0	0
89	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	0	0	0
90	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0	0	0	0
91	Izin Usaha Toko Modern	2	2	0	0	0	0
92	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0	0	0	0
93	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.153</b>	<b>5.996</b>	<b>4</b>	<b>6.544</b>	<b>6.416</b>	<b>4</b>

Realisasi pendapatan pada tahun 2020 tidak mencapai 100% atau hanya mencapai 95,98%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi retribusi, walaupun sudah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan dan sosialisasi PERBUB pemutihan IMB, namun karena adanya pandemi covid-19 secara nasional, berdampak pada penurunan Retribusi IMB sehingga realisasi tidak tercapai. Untuk tahun 2019 realisasi pendapatan mencapai 133,64% atau bisa di katakan capaiannya melebihi dari apa yang telah di targetkan.

Adapun rincian Realisasi Retribusi selama dua tahun terakhir Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana tabel II.4

Table II.4  
Realisasi Retribusi Dua Tahun Terakhir  
( Tahun 2019 dan Tahun 2020 )

No	Jenis Perijinan	Retribusi Tahun 2019		Retribusi Tahun 2020		Ket
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	IMB	3.300.000.000	4.409.501.640	2.220.000.000	2.130.681.500	
2	Retribusi Izin Gangguan/ HO		825.000		-	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>4.410.326.640</b>	<b>2.220.000.000</b>	<b>2.130.681.500</b>	

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat memenuhi target Indikator Kinerja Utama dengan maksimal yaitu Realisasi Nilai investasi 369,72 %, Nilai IKM 108,57% dan pengaduan 100 % dapat ditangani hal ini dikarena :

- Adanya kegiatan promosi penanaman modal setiap tahun;
- Membuat kajian – kajian secara terus menerus terhadap regulasi yang ada untuk memudahkan investor untuk berinvestasi.
- Adanya Pengusaha yang melaporkan usahanya melalui LKPM meskipun tingkat kesadaran pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal melalui LKPM belum optimal .

Walaupun pada tahun 2020 ada pandemic covid 19, namun demikian tidak berdampak signifikan terhadap realisasi investasi di Kabupaten Pemalang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat ditabel dibawah ini:

Tabel II.5

Realisasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Tahun 2020  
Yang mengacu Pada Tujuan dan sarana RPJMD  
Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2020	
			Target Capaian	Realisasi
<b>1.</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN) (rupiah) (diberi penjelasan terkait target yang merupakan nilai akumulasi dari tahun – tahun sebelumnya)	Rupiah	744.604.689.677	2.752.946.626.619
2	Nilai SKM	Nilai IKM	77	83,60
3	Prosentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	%	100	100

Tabel II.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasional	IKU (Perbup No.58/2018)	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	744.604.689.677	749.604.689.677	-	-	2.752.946.626.619	-	-	-	
2	Nilai SKM		Nilai SKM	77	83,60	83,80	84	83,60	-	83,80	84	
3	Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani		Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100	-	-	-	100	-	-	-	

### 2.3 Hasil evaluasi SAKIP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2019 dan tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor **55,31** dengan kategori CC (Cukup). Penilaian tersebut menunjukkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai CC merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019 & 2020**

No	Komponen	Bobot	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	22,28	21,81
2	Pengukuran Kinerja	25	11,88	10,31
3	Pelaporan Kinerja	15	8,49	7,59
4	Evaluasi Intenal	10	1,54	1,33
5	Capaian Kinerja	20	14,38	14,25
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	<b>58,57</b>	<b>55,31</b>

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain terdiri dari 8 Area Penilaian diantaranya Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur, Area Pengatan Akuntabilitas, Area Pengawasan, dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai skor **27,13**. Penilaian tersebut menunjukkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya memiliki Reformasi Birokrasi yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai skor **27,13** merupakan Jumlah akumulasi penilaian terhadap komponen Pemenuhan sebesar **9,29** dan Komponen Reform sebesar **17,85** manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 & 2021**

No	Komponen	Bobot	Pemenuhan	
			2020	2021
<b>Pemenuhan</b>				
1	Area Manajemen Perubahan	2,00	1,20	1,27
2	Area Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50	0,50
3	Area Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	0,92	0,58
4	Area Penataan Tata Laksana	1,00	0,64	0,64
5	Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur	1,40	0,94	0,89
6	Area Pengatan Akuntabilitas	2,50	2,01	2,01
7	Area Pengawasan	2,20	1,85	1,62
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,80	1,78
<b>Total</b>		<b>14,60</b>	<b>9,86</b>	<b>9,29</b>
<b>Reform</b>				
1	Area Manajemen Perubahan	3,00	2,54	2,54
2	Area Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
3	Area Penataan dan Penguatan	1,50	1,50	1,50



	Organisasi			
4	Area Penataan Tata Laksana	3,75	3,59	3,59
5	Area Penataan Sistim Manajemen SDM aparatur	2,00	1,25	1,00
6	Area Pengatan Akuntabilitas	3,75	2,42	2,17
7	Area Pengawasan	1,95	1,95	1,83
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,64	3,22
<b>Total</b>		<b>2,70</b>	<b>18,88</b>	<b>17,85</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	<b>28,74</b>	<b>27,13</b>

## 2.4 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

### 2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan investasi. Hal ini dikarenakan :
  - Pemalang belum memiliki kawasan industri yang dikelola Pemerintah, padahal berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki kawasan peruntukan industry seluas 1.909,04 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan.
  - Harga tanah yang relatif tinggi.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal, dikarenakan pelaku usaha lebih mementingkan untuk menjalankan usahanya dibandingkan dengan harus mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Pelaku usaha yang bersekala Nasional jumlahnya 134 pelaku usaha tetapi yang melakukan pelaporan penanaman modal hanya 37 pelaku usaha. Padahal dengan adanya pelaporan penanaman modal kita bisa mengetahui perkembangan investasi penanaman modal.
3. Belum ada pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan public. Dengan adanya mal pelayanan public akan memberikan kemudahan pelayanan

perijinan pada pelaku usaha sehingga akan menarik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2021 – 2026.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pemalang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaanya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

**Tujuan Penanaman Modal adalah :**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perkembangan nasional, dan
2. Mempercepat peningkatan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pemalang terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal :  
Didukung 2 program
  - Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.  
Indikatornya : Presentase peningkatan jumlah investor.
  - Program Promosi Penanaman Modal  
Indikatornya : Prosentase terlaksananya promosi penanaman modal
2. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal :  
Didukung 1 program
  - Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal  
Indikatornya : Presentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu
3. Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik  
Didukung 1 program
  - Program Pelayanan Penanaman Modal  
Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal
  - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

#### 2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Permenpan RB tersebut berisi tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang di laksanakan oleh PD yang mengampu tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dengan adanya Refocusing Anggaran yang semula Mal Pelayanan Publik akan di bangun di Tahun 2021 ini tidak dapat terlaksana di karenakan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik di alihkan untuk Pemulihan Ekonomi. Untuk menindaklanjuti Isu tersebut diatas dan untuk meningkatkan calon Investor menanamkan usahanya di Kabupaten Pemalang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada APBD Tahun 2022 mengusulkan kembali Kegiatan MPP (Mal Pelayanan Publik).

### 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”***

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2022 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Penurunan Kemiskinan, Prioritas Pembangunan Kabupaten adalah :
  - Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, Kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
  - Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan social secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan,

peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemic covid-19.

2. Peningkatan Kualitas sumber daya masyarakat, prioritasnya adalah :

- Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompensasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Tata kelola pemerintahan, prioritasnya adalah :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good gavernance disertai dengan peningkatan pelayanan public, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
- b. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan Daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukukungun pada sector perdangan, UMKM, Kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, serta peningkatan pembangunan infrasrtuktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPd yang telah disusun, program, kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan atau tahun 2021.

Tabel II.9  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.972.909.892</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.972.909.892</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96.321.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96.321.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	35.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan	Dinas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	8.520.000	Koordinasi dan	Dinas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	8.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PMPTSP	Perubahan RKA-SKPD yang disusun			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PMPTSP	Perubahan RKA-SKPD yang disusun				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	7.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	7.380.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	7.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	21.921.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	21.921.000		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.567.266.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.595.815.700</b>		
	Penyediaan Gaji	Dinas	Jumlah gaji dan tunjangan	26 OB	3.549.306.000	Penyediaan Gaji dan	Dinas	Jumlah gaji dan	26 OB	3.549.306.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	dan Tunjangan ASN	PMPTSP	ASN yang disediakan			Tunjangan ASN	PMPTSP	tunjangan ASN yang disediakan				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Penanggungjawab pengelolaan keuangan SKPD setiap bulan	12 Bulan	0	Elaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Penanggungjawab pengelolaan keuangan SKPD setiap bulan	12 Bulan	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	10.000.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 Dokumen	7.960.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 Dokumen	7.960.000		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>155.897.142</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>155.897.142</b>		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah jenis kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-Undangan yang dilaksanakan	2 Jenis	56.526.342	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah jenis kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-Undangan yang	2 Jenis	56.526.342		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dilaksanakan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	60 Orang	99.370.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	60 Orang	99.370.800	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>350,227,100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>350,227,100</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah komponen listrik yang dibeli	12 Bulan	7,586,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jenis dan jumlah komponen listrik yang dibeli	12 Bulan	7,586,900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bahan logistik kantor yang di beli	12 Bulan	168,475,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bahan logistik kantor yang di beli	12 Bulan	168,475,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	40,029,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	40,029,500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dinas PMPTSP	Jenis dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 Bulan	6,350,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dinas PMPTSP	Jenis dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 Bulan	6,350,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan					undangan					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah tamu yang di fasilitasi	51 Orang	1,280,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah tamu yang di fasilitasi	51 Orang	1,280,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	140 Kalli	126,505,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	140 Kalli	126,505,200	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35,335,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35,335,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang di beli	3 Unit	35,335,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang di beli	3 Unit	35,335,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>419,636,056</b>	<b>enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>419,636,056</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah surat terkirim	5.500 surat	111,913,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah surat terkirim	5.500 surat	111,913,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Dinas PMPTSP	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya	12 Bulan	104,725,056	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Dinas PMPTSP	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi,	12 Bulan	104,725,056	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sumber Daya Air dan Listrik		air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi			Sumber Daya Air dan Listrik		sumber daya air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah SDM Non PNS setiap Bulan	12 Bulan	202,997,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah SDM Non PNS setiap Bulan	12 Bulan	202,997,600	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>319,677,894</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>319,677,894</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan yang berizin dan dipelihara	1 Unit	58,542,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan yang berizin dan dipelihara	1 Unit	58,542,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	21 Unit	114,380,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	21 Unit	114,380,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	15 Unit	71,138,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	15 Unit	71,138,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah dan luas gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	48.177.894	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah dan luas gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	48.177.894	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	33 Unit	27.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	33 Unit	27.440.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>2%</b>	<b>108,870,492</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL penetapan Pemberian</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>2%</b>	<b>108,870,492</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian</b>	<b>100%</b>	<b>60,721,692</b>	<b>Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian</b>	<b>100%</b>	<b>60,721,692</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>f Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a</b>		<b>Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>			<b>yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>			
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Regulasi yang tersusun	2	57,809,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Regulasi yang tersusun	2	57,809,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Monev Perusahaan yang dilakukan (Kegiatan Monev)	3	2.912,692	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Monev Perusahaan yang dilakukan (Kegiatan Monev)	3	2.912,692	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>48,148,800</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>48,148,800</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen kajian peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	1 Kegiatan	28,148,800	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen kajian peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	1 Kegiatan	28,148,800	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>179,090,908</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>179,090,908</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>171.520.478.723</b>	<b>179,090,908</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>171.520.478.723</b>	<b>179,090,908</b>	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang	1	19,998,272	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman	1	19,998,272	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Modal		tersusun					modal yang tersusun			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	1 Kegiatan Promosi	159,092,636	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	1 Kegiatan Promosi	159,092,636	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>95%</b>	<b>414,991,036</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>95%</b>	<b>414,991,036</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>100%</b>	<b>414,991,036</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>100%</b>	<b>414,991,036</b>	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Dinas PMPTSP	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	5.250 Ijin Terbit	300,393,336	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Dinas PMPTSP	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	5.250 Ijin Terbit	300,393,336	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah cek lokasi/laporan perijinan yang terlaksana	240 kali kegiatan cek lokasi	94,862,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah cek lokasi/laporan perijinan yang terlaksana	240 kali kegiatan cek lokasi	94,862,000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlaksana	4 layanan Pengaduan	9,735,700	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlaksana	4 layanan Pengaduan	9,735,700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan	10 kali Koordinasi	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	10 kali Koordinasi	10.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		pemberian fasilitas / Insentif Daerah			Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		penetapan pemberian fasilitas / Insentif Daerah			
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>	<b>42%</b>	<b>79,999,700</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>	<b>42%</b>	<b>79,999,700</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>79,999,700</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>79,999,700</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	22 kali Pemantauan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	22 kali Pemantauan	25.000.000	
	oordinasi dan Sinkronisasi	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan	9 Kali Pembinaan	44,999,700	oordinasi dan Sinkronisasi	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	9 Kali Pembinaan	44,999,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana			Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	10 Kali Pengawasan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	10 Kali Pengawasan	10.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	
	Pengolahan, Penyajian	Dinas PMPTSP	jumlah data/informasi pelayanan perizinan dan	1 data informasi	44,502,672	Pengolahan, Penyajian	Dinas PMPTSP	jumlah data/informasi	1 data informasi	44,502,672	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		non perizinan yang tersedia	pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersedia		dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersedia		
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5.771.815.000</b>					<b>5.771.815.000</b>	

## 2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang hanya mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Sehingga pada tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang menampung usulan dari masyarakat.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun 2021 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**.

#### 2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Investasi/ BKPM

Visi yang dirumuskan adalah :

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Misi (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sementara itu BKPM juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs),
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal

- d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
- e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
- f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
- g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

### **3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah ( DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah )**

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 yang menjadi arah Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

- Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
  - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
  - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
  - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas

Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- Pemberian kemudahan perizinan investasi
- Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- Mengembangkan digital investment promotion;
- Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- Mendorong perwujudan investasi hijau.

Dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi jika menilik dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah sejalan.

#### 4. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022, berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022, diarahkan pada **percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi**, dengan prioritas pada :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, melalui peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) pada ruas jalan – jalan local primer strategis yang menghubungkan antar kecamatan dan batas kabupaten, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala kontraktual, pemeliharaan rutin swakelola.
2. Kebijakan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19 yang diarahkan pada kemudahan investasi dan perijinan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan non tunai pelaku perikanan, pengembangan desa mandiri pangan, fasilitasi akses



permodalan, akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta peningkatan pariwisata melalui pengembangan desa wisata dan pengelolaan destinasi wisata.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan digitalisasi desa dan peningkatan kerjasama desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan mental spiritual
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022 diarahkan pada pencapaian :

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,64 – 3,64%
- Tingkat inflasi sebesar 1,36 – 3,36%
- Tingkat pengangguran terbuka sebesar ± 7,40%
- Angka kemiskinan sebesar ± 15,85%
- Indeks Pembangunan Gender sebesar 86,03
- Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 66,64%

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
1.	Penurunan Kemiskinan	<p>a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor – sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata</p> <p>b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang berdampak pandemic covid 19</p> <p>c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui percepatan pembangunan desa</p>
2	Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat	Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan mental spiritual
3	Tata kelola pemerintahan	a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah</li> <li>b. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam</li> </ul>
4	Kualitas infrastruktur jalan	Percepatan pembanguna infrastruktur jalan

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang
3. Pemutahiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi serta informasi terkait dengan perijinan dan non perijinan
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan di Kabupaten Pemalang dan produk – produk UMKM dengan melakukan pameran, promosi melalui website gerai investasi dan media sosial lainnya
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM
7. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Melakukan kajian – kajian terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan segera melakukan penyesuaian regulasi daerah terhadap regulasi pusat.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pematang Jaya. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 5 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal** Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2022 adalah Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, Kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pematang Jaya seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan social masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pematang Jaya tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Presentase Peningkatan PMA dan PMDN	%	2
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Nilai IKM	Nilai	83,80

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolak ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2022 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

Permasalahan di bidang penanaman modal yang menjadi prioritas pembangunan daerah :

1. Upaya peningkatan promosi Investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - Program pengembangan iklim penanaman modal
  - Program promosi penanaman modal
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Belum ada pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mall pelayanan publik. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
  - Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
  - Program pelayanan penanaman modal

Dari tiga permasalahan diatas, maka rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
    - 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel III.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>827.494.808</b>				<b>6.891.739.000</b>
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>2%</b>	<b>108,870,492</b>	DAU		<b>3,05%</b>	<b>200.000.000</b>
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>60.721.692</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>84.349.000</b>
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang tersusun	Dinas PMPTSP	2	57,809,000	DAU		2	66.000.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Monev Perusahaan yang dilakukan (Kegiatan Monev)	Dinas PMPTSP	3	2.912,692	DAU		21	18.349.000
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan</b>		<b>100%</b>	<b>48,148,800</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>115.651.000</b>



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>kajian peta potensi investasi</b>							
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	20.000.000	DAU			
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kajian peta potensi dan peluang usaha yang terlaksana	Dinas PMPTSP	1 Kegiatan	28,148,800	DAU		1 Kegiatan	115.651.000
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>179,090,908</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>212.000.000</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>171.520.478 .723</b>	<b>179,090,908</b>	DAU		<b>176.666.093.084</b>	<b>212.000.000</b>
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun	Dinas PMPTSP	1	19,998,272	DAU		1 Dokumen	60.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	Dinas PMPTSP	1 Kegiatan Promosi	159,092,636	DAU		1 Kegiatan Promosi	152.000.000
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>95%</b>	<b>414,991,036</b>	DAU		<b>96%</b>	<b>6.000.000.000</b>
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>414,991,036</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>6.000.000.000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>PMPTSP</b>						
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	Dinas PMPTSP	5.250 Ijin Terbit	300,393,336	DAU		5.500 Ijin Terbit	5.768.498.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah cek lokasi yang terlaksana	Dinas PMPTSP	240 kali kegiatan cek lokasi	94,862,000	DAU		240 kali kegiatan cek lokasi	112.502.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlaksana	Dinas PMPTSP	4 layanan Pengaduan	9,735,700	DAU		4 layanan Pengaduan	19.000.000
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / Insentif Daerah	Dinas PMPTSP	10 kali Koordinasi	10.000.000	DAU		75 kali Koordinasi	100.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>42%</b>	<b>79,999,700</b>	DAU		<b>44%</b>	<b>452.462.000</b>
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>79,999,700</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>452.462.000</b>
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Dinas PMPTSP	22 kali Pemantauan	25.000.000	DAU		22 kali Pemantauan	85.820.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Dinas PMPTSP	9 Kali Pembinaan	44,999,700	DAU		9 Kali Pembinaan	272.262.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Dinas PMPTSP	10 Kali Pengawasan	10.000.000	DAU		13 Kali Pengawasan	94.380.000
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>27.277.000</b>
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>27.277.000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data/informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	Dinas PMPTSP	1 data informasi pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersedia	44,502,672	DAU		1 data informasi pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersedia	27.277.000
II	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				4.944.410.192				6.979.199.000
12.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	100%	4.944.410.192	DAU		100%	6.979.199.000
12.18.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas PMPTSP	100%	96.321.000	DAU		100%	346.121.000
12.18.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	35.000.000	DAU		2 Dokumen	135.000.000
12.18.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
12.18.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	8.520.000	DAU		1 Dokumen	8.520.000
12.18.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	6.500.000	DAU		1 Dokumen	6.500.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12.18.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	7.380.000	DAU		1 Dokumen	7.380.000
12.18.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	7.000.000	DAU		1 Dokumen	7.000.000
12.18.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	21.921.000	DAU		2 Dokumen	171.921.000
<b>12.18.1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>3.567.266.000</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>3.787.928.000</b>
12.18.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Dinas PMPTSP	26 OB	3.549.306.000	DAU		26 OB	3.559.128.000
12.18.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penanggungjawab pengelolaan keuangan SKPD setiap bulan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	0	DAU		13 OB	210.840.000
12.18.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
12.18.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	7.960.000	DAU		2 Dokumen	7.960.000
<b>12.18.1.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik</b>	<b>Prosentase terlaksananya</b>	<b>Dinas</b>			DAU		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>PMPTSP</b>						
12.18.1.2.03.06	Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan penataan barang daerah SKPD yang dilaksanakan	Dinas PMPTSP			DAU		1 laporan	10.000.000
<b>12.18.1.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah SKPD</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>			DAU		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
12.18.1.2.03.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah SKPD yang dilaksanakan	Dinas PMPTSP			DAU		1 laporan	10.000.000
<b>12.18.1.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>155.897.142</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>331.161.200</b>
12.18.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan yang disediakan	Dinas PMPTSP					65 stel	42.250.000
12.18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan yang di laksanakan	Dinas PMPTSP	2 Jenis	56.526.342	DAU		2 jenis	70.140.000
12.18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	Dinas PMPTSP	60 Orang	99.370.800	DAU		120 Orang	218.771.200
<b>12.18.1.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>350,227,100</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>818.267.600</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12.18.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang dibeli	Dinas PMPTSP	12 Bulan	7,586,900	DAU		12 Bulan	23.600.000
12.18.1.2.06.03	Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas PMPTSP					12 Bulan	10.000.000
12.18.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang di penuhi	Dinas PMPTSP	12 Bulan	168,475,500	DAU		12 Bulan	179.894.000
12.18.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	40,029,500	DAU		12 Bulan	240.016.600
12.18.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Dinas PMPTSP	12 Bulan	6,350,000	DAU		12 Bulan	6.350.000
12.18.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi	Dinas PMPTSP	51 Orang	1,280,000	DAU		255 Orang	6.400.000
12.18.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dinas PMPTSP	140 Kalli	126,505,200	DAU		210 Kalli	352.000.000
<b>12.18.1.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>35,335,000</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>695.000.000</b>
12.18.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di beli	Dinas PMPTSP			DAU		2 Unit	70.000.000
12.18.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di beli	Dinas PMPTSP			DAU		10 Unit	25.000.000
12.18.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Dinas	3 Unit	35,335,000	DAU		24 Unit	600.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Mesin Lainnya	yang di beli	PMPTSP						
12.18.1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>419,636,056</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>413.640.056</b>
12.18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Dinas PMPTSP	5.500 surat	111,913,400	DAU		5.500 surat	110.915.000
12.18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi	Dinas PMPTSP	12 Bulan	104,725,056	DAU		4 Jenis/ Bulan	104.725.056
12.18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap Bulan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	202,997,600	DAU		12 orang /Bulan	198.000.000
12.18.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	<b>100%</b>	<b>319,677,894</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>566.881.144</b>
12.18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang berizin dan dipelihara	Dinas PMPTSP	1 Unit	58,542,000	DAU		1 Unit	122.910.000
12.18.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	Dinas PMPTSP	21 Unit	114,380,000	DAU		21 Unit	183.960.000
12.18.1.2.09.05	Pemeliharaan jasa	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas					15 Unit	50.000.000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	pemeliharaan mebel		PMPTSP						
12.18.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Dinas PMPTSP	15 Unit	71,138,000	DAU		15 Unit	71.138.000
12.18.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung Kantor yang dipelihara	Dinas PMPTSP	1 Gedung	48.177.894	DAU		1 Gedung	98.177.894
12.18.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Dinas PMPTSP	33 Unit	27.440.000	DAU		33 Unit	40.695.250

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung Program Unggulan Bupati Kota Industri (KOIN) terdiri dari 6 Program 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Rumusan rencana kerja dan pendapatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tabel terlampir :

**Tabel 4.1**  
**MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2022**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN		Persentase peningkatan PMA dan PMDN	2%		3%		
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Nilai SKM	83,80		84		
			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.944.410.192	100%	6.979.199.000	Dinas PMPTSP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	96.321.000	100%	346.121.000	Dinas PMPTSP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	135.000.000	Dinas PMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Dinas PMPTSP

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.520.000	1 Dokumen	8.520.000	Dinas PMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	Dinas PMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	7.380.000	1 Dokumen	7.380.000	Dinas PMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	Dinas PMPTSP	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	21.921.000	2 Dokumen	171.921.000	Dinas PMPTSP	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.567.266.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.787.928.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	26 OB	3.549.306.000	26 OB	3.559.128.000	Dinas PMPTSP	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penanggungjawab pengelolaan keuangan SKPD setiap bulan	12 Bulan	0	13 OB	210.840.000	Dinas PMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Dinas PMPTSP	

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 Dokumen	7.960.000	2 Dokumen	7.960.000	Dinas PMPTSP
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	Dinas PMPTSP
				Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan penataan barang daerah SKPD yang dilaksanakan			1 laporan	10.000.000	Dinas PMPTSP
				<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah SKPD</b>			<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	Dinas PMPTSP
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah SKPD yang dilaksanakan			1 laporan	10.000.000	Dinas PMPTSP
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>155.897.142</b>	<b>100%</b>	<b>331.161.200</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan yang disediakan			65 stel	42.250.000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	2 Jenis	56.526.342	2 jenis	70.140.000	Dinas PMPTSP
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	60 Orang	99.370.800	120 Orang	218.771.200	Dinas PMPTSP

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>350,227,100</b>	<b>100%</b>	<b>818.267.600</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang dibeli	12 Bulan	7,586,900	12 Bulan	23.600.000	Dinas PMPTSP	
			Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			12 Bulan	10.000.000	Dinas PMPTSP	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang dipenuhi	12 Bulan	168,475,500	12 Bulan	179.894.000	Dinas PMPTSP	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang dipenuhi	12 Bulan	40,029,500	12 Bulan	240.016.600	Dinas PMPTSP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	12 Bulan	6,350,000	12 Bulan	6.350.000	Dinas PMPTSP	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi	51 Orang	1,280,000	255 Orang	6.400.000	Dinas PMPTSP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	140 Kalli	126,505,200	210 Kalli	352.000.000	Dinas PMPTSP	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35,335,000</b>	<b>100%</b>	<b>695.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di beli			2 Unit	70.000.000	Dinas PMPTSP	
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di beli					Dinas PMPTSP	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang di beli	3 Unit	35,335,000	-	-	Dinas PMPTSP	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>419,636,056</b>	<b>100%</b>	<b>413.640.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	5.500 surat	111,913,400	5.500 surat	110.915.000	Dinas PMPTSP	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, publikasi, dan internet yang terpenuhi	12 Bulan	104,725,056	4 Jenis/ Bulan	104.725.056	Dinas PMPTSP	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap Bulan	12 Bulan	202,997,600	12 orang /Bulan	198.000.000	Dinas PMPTSP	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>319,677,894</b>	<b>100%</b>	<b>566.881.144</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang berizin dan dipelihara	1 Unit	58,542,000	1 Unit	122.910.000	Dinas PMPTSP	



Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	21 Unit	114,380,000	21 Unit	183.960.000	Dinas PMPTSP
				Pemeliharaan jasa pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			15 Unit	50.000.000	Dinas PMPTSP
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	15 Unit	71,138,000	15 Unit	71.138.000	Dinas PMPTSP
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	48.177.894	1 Gedung	98.177.894	Dinas PMPTSP
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	33 Unit	27.440.000	33 Unit	40.695.250	Dinas PMPTSP
			<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>2%</b>	<b>108,870,492</b>	<b>3,05%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>60.721.692</b>	<b>100%</b>	<b>84.349.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang tersusun	2	57,809,000	2	66.000.000	Dinas PMPTSP

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Monev Perusahaan yang dilakukan (Kegiatan Monev)	3	2.912,692	21	18.349.000	Dinas PMPTSP
				<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan kajian Peta Potensi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>48,148,800</b>	<b>100%</b>	<b>115.651.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000			Dinas PMPTSP
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	1 Kegiatan	28,148,800	1 Kegiatan	115.651.000	Dinas PMPTSP
			<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>179,090,908</b>	<b>100%</b>	<b>212.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>	<b>171.520.478.723</b>	<b>179,090,908</b>	<b>176.666.093.084</b>	<b>212.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun	1	19,998,272	1 Dokumen	60.000.000	Dinas PMPTSP
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	1 Kegiatan Promosi	159,092,636	1 Kegiatan Promosi	152.000.000	Dinas PMPTSP
			<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non</b>	<b>95%</b>	<b>414,991,036</b>	<b>96%</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>

Rencana Tahun 2022 dan 2023									
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>Perizinan Penanaman Modal</b>					
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perijinan yang disetujui</b>	<b>100%</b>	<b>414,991,036</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	5.250 Ijin Terbit	300,393,336	5.500 Ijin Terbit	5.768.498.000	Dinas PMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah cek lokasi/laporan perijinan yang terlaksana	240 kali kegiatan cek lokasi	94,862,000	240 kali kegiatan cek lokasi	112.502.000	Dinas PMPTSP
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengolahan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlaksana	4 layanan Pengaduan	9,735,700	4 layanan Pengaduan	19.000.000	Dinas PMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / Insentif Daerah	10 kali Koordinasi	10.000.000	75 kali Koordinasi	100.000.000	Dinas PMPTSP
			<b>5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>	<b>42%</b>	<b>79,999,700</b>	<b>44%</b>	<b>452.462.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
			<b>Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>Prosentase terselenggaranya</b>	<b>100%</b>	<b>79,999,700</b>	<b>100%</b>	<b>452.462.000</b>	<b>Dinas</b>

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				<b>Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>					<b>PMPTSP</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	22 kali Pemantauan	25.000.000	22 kali Pemantauan	85.820.000	Dinas PMPTSP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	9 Kali Pembinaan	44,999,700	9 Kali Pembinaan	272.262.000	Dinas PMPTSP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	10 Kali Pengawasan	10.000.000	13 Kali Pengawasan	94.380.000	Dinas PMPTSP
			<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase realisasi perijinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	<b>100%</b>	<b>27.277.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>44,502,672</b>	<b>100%</b>	<b>27.277.000</b>	<b>Dinas PMPTSP</b>
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	jumlah data/informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	1 data informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	44,502,672	1 data informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	27.277.000	Dinas PMPTSP

Rencana Tahun 2022 dan 2023										
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		yang tersedia		yang tersedia			
<b>Jumlah</b>						<b>5.771.815.000</b>		<b>13.870.938.000</b>		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Pemalang, 1 Juli 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pemalang

  
KHAERON, SH, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680323 199003 1 012